



LAPORAN KINERJA 20 TAHUN 17

Terwujudnya Kota Malang
sebagai Kota yang Bermartabat

PEMERINTAH KOTA MALANG
Jl. Tugu Nomor 1, Malang - Jawa Timur 65119
Telp. (0341) 362704 Fax. (0341) 352070
www.malangkota.go.id

NOMINOR
MALANG SURSUM **MOVEOR**



**WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

Malang, 23 Maret 2018

Nomor : 713/ *STB* /35.73.133/2018
Sifat : Amat Segera
Lampiran : 1 (satu) buku
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja
Tahunan Pemerintah Kota Malang
Tahun 2017

Kepada
Yth. Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
di
JAKARTA

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini disampaikan:

1. Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Malang Tahun 2017 sebanyak 1 (satu) buku;
2. *Soft copy* Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Malang Tahun 2017 sebanyak 1 (satu) keping *Compact Disk* (CD).

Demikian untuk menjadi maklum.


Pjs. WALIKOTA MALANG,
Dt. L. WAHID WAHYUDI, MT

Tembusan:

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Timur di Surabaya.



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah patut kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Malang Tahun 2017 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Malang memuat informasi kinerja Pemerintah Kota Malang dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018.

Laporan Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kota Malang pada Tahun 2017.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Malang ini disusun, agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

Malang, 23 Maret 2018


Pjs. **WALIKOTA MALANG,**

Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT





DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Telah Direviu	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Kota Malang	2
C. Pertumbuhan Ekonomi.....	6
D. Susunan Perangkat Daerah.....	7
E. Sumber Daya Aparatur	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis Tahun 2013-2018.....	10
B. Indikator Kinerja Utama	21
C. Perjanjian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Pengukuran Kinerja.....	35
1. Capaian Kinerja Sasaran.....	37
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya	59
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen yang Merupakan Kemajuan Pencapaian Target Jangka Menengah.....	65
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Daerah Sekitar	73
B. Akuntabilitas Keuangan	78
C. Permasalahan dan Solusi dalam Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran	86
BAB IV PENUTUP	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90





PEMERINTAH KOTA MALANG INSPEKTORAT

Jl.GAJAHMADA No. 2A MALANG, Telp. (0341) 364450-321276

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2017

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi Pemerintah Kota Malang untuk tahun anggaran 2017 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 jo. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Malang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Malang, 16 Maret 2018


Plt. INSPEKTUR KOTA MALANG,
Dra. ANITA SUKMAWATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19601217 198603 2 010





RINGKASAN EKSEKUTIF

Peraturan Daerah Kota Malang Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018, merupakan kebijakan yang mengatur penyempurnaan indikator kinerja dalam RPJMD, telah menetapkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai Pemerintah Kota Malang dalam kurun waktu lima tahun mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Pada tahun 2017 Pemerintah Kota Malang melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, telah menetapkan Program dan Kegiatan serta anggaran yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum capaian kinerja sasaran yang telah dilakukan pengukuran telah berhasil dicapai dengan maksimal yaitu 90%.

Anggaran yang digunakan dalam mencapai keberhasilan tersebut sebesar Rp. 968.159.773.680,71 dari pagu anggaran Rp. 1.221.393.706.394,05, sehingga terdapat efisiensi anggaran Rp. 253.233.932.713,34 atau 20,73%.

Keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Kota Malang dapat terwujud berkat dukungan semua elemen masyarakat Kota Malang, yang akan terus dipelihara dan akan lebih ditingkatkan guna mencapai sasaran kinerja yang lebih baik.





BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.



B. GAMBARAN UMUM KOTA MALANG

1. Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kota Malang terletak pada $112^{\circ}34'38.83''\text{BT}$ - $112^{\circ}40'59.41''\text{BT}$ dan $07^{\circ}54'38.97''\text{LS}$ - $08^{\circ}02'47.04''\text{LS}$, dan secara geografis, letak Kota Malang berbatasan langsung dengan Kecamatan di wilayah Kabupaten Malang, yakni:

Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso

Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang

Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji

Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

Secara topografis sebagian besar wilayah Kota Malang merupakan dataran dengan dikelilingi deretan bukit dan pegunungan. Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440-667m (dpal), dengan keadaan kemiringan tanah (topografi) Kota Malang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Kemiringan 0-8% tersebar diseluruh kecamatan di Kota Malang. Kelas kemiringan ini tergolong datar agak landai. Kondisi tanah yang berada pada kelas kemiringan ini sangat potensial untuk dijadikan permukiman, pertanian, dan perkebunan.
- b. Kemiringan 8-15% merupakan kelas kemiringan yang tergolong landai agak miring. Kelas kemiringan ini berada di seluruh kecamatan di Kota Malang. Kondisi tanah pada kelas kemiringan ini cocok untuk dijadikan berbagai jenis usaha konservasi tanah dan air.
- c. Kemiringan 15-25% merupakan kelas kemiringan yang tergolong miring agak curam. Kelas kemiringan ini juga



berada diseluruh kecamatan Kota Malang namun hanya pada lokasi-lokasi tertentu seperti sempadan sungai. Wilayah terluas pada kemiringan ini yaitu Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru.

- d. Kemiringan 25-45% merupakan kelas kemiringan yang tergolong curam. Kelas kemiringan ini di Kota Malang berada di sekitar sempadan sungai. Namun wilayah terluas yang berada pada kelas kemiringan ini yaitu Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru yang merupakan tempat tertinggi di Kota Malang. Kondisi tanah pada kelas kemiringan ini kurang baik untuk dijadikan pertanian namun demikian perlu dikelola dengan memilih tanaman yang bisa digunakan untuk konservasi.
- e. Kemiringan >45% merupakan kelas kemiringan sangat curam. Kelas kemiringan ini di Kota Malang berada di Kecamatan Kedungkandang. Kondisi tanah pada kelas kemiringan ini sangat rentan terhadap erosi maka sebaiknya perlu upaya pelestarian hutan.

Dengan luas wilayah mencapai 110,06 km², Kota Malang dibagi atas 5 Kecamatan dan 57 Kelurahan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1
Luas Wilayah Kota Malang Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Kota (%)
1.	Kedungkandang	12	39,89	36,24
2.	Sukun	11	20,97	19,05
3.	Klojen	11	8,83	8,02
4.	Blimbing	11	17,77	16,15
5.	Lowokwaru	12	22,60	20,53
Total		57	110,06	100

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Malang



2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Malang per 31 Desember 2017 sebesar 904.165 jiwa, yang terdiri dari WNA sejumlah 960 jiwa dan WNI sejumlah 903.205 jiwa yang tersebar di 5 Kecamatan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 8.778 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Kedungkandang sebesar 212.459 jiwa yang terbagi ke dalam 65.582 Kepala Keluarga (KK), sedangkan Kecamatan Klojen merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yakni sebanyak 110.073 jiwa yang terbagi ke dalam 36.396 KK, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kota Malang Berdasarkan Kecamatan per 31 Desember 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase Terhadap Jumlah Penduduk Kota (%)	Jumlah KK
1.	Kedungkandang	212.459	23,50	65.582
2.	Sukun	209.053	23,12	65.999
3.	Blimbing	198.428	21,95	62.638
4.	Lowokwaru	174.152	19,26	54.919
5.	Klojen	110.073	12,17	36.396
Total		904.165	100%	285.534

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dari segi kepadatan penduduk, Kecamatan Klojen merupakan wilayah yang paling padat penduduk, sementara Kecamatan Kedungkandang menjadi kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah sebagaimana tabel berikut:



Tabel 1.3
Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Malang
Berdasarkan Kecamatan
per 31 Desember 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1.	Kedungkandang	212.459	39,89	5.236
2.	Sukun	209.053	20,97	9.969
3.	Blimbing	198.428	17,77	11.166
4.	Lowokwaru	174.152	22,60	7.706
5.	Klojen	110.073	8,83	12.466
Total		904.165	110,06	8.215

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan aspek usia, sebagian besar penduduk di Kota Malang terkategori sebagai penduduk usia produktif, yakni pada rentang usia 15-64 tahun sebesar 639.978 jiwa atau 70,78% dari total jumlah penduduk, sedangkan jumlah penduduk yang termasuk ke dalam kategori penduduk usia tidak produktif sebanyak 264.187 jiwa atau 29,22% dari total penduduk. Adapun uraian jumlah penduduk berdasarkan klasifikasi usia sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Kota Malang
Berdasarkan Kelompok Umur
per 31 Desember 2017

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Persentase Terhadap Jumlah Penduduk (%)
1.	0 - 4	57.308	6,34
2.	5 - 9	69.709	7,71
3.	10 - 14	68.754	7,60
4.	15 - 19	69.342	7,67
5.	20 - 24	66.305	7,33
6.	25 - 29	66.189	7,32



No.	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Persentase Terhadap Jumlah Penduduk (%)
7.	30 - 34	75.832	8,39
8.	35 - 39	81.933	9,06
9.	40 - 44	70.213	7,77
10.	45 - 49	66.444	7,35
11.	50 - 54	56.635	6,26
12.	55 - 59	49.437	5,47
13.	60 - 64	37.648	4,16
14.	≥ 65	68.416	7,57
Total		904.165	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

C. PERTUMBUHAN EKONOMI

Perekonomian Kota Malang ditunjang dari berbagai sektor, diantaranya industri, jasa, perdagangan, dan pariwisata. Sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur, laju ekonomi Kota Malang merupakan yang terpenting kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang juga terkenal sebagai tempat berdiri dan berkembangnya perusahaan rokok. Di bidang pariwisata, Kota Malang yang terletak di dataran tinggi sehingga berhawa sejuk, menjadi daya tarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk mengunjungi Malang. Di Malang juga banyak dijumpai hotel dan rumah singgah (*guest house*) yang mengakomodasi kunjungan wisatawan.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada awal tahun 2017 yaitu sebesar 5,61%, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang sebesar 5,55% dan nasional sebesar 5,02%. Perekonomian Kota Malang didukung oleh kegiatan perdagangan yang merupakan sektor yang sangat dominan dalam membentuk perekonomian Kota Malang, kontribusi pembentukan Produk



Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 29,54% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 28,90%. Perkembangan laju pertumbuhan sektor Perdagangan di Kota Malang sebesar 6,31%. Kondisi tersebut didukung oleh usaha kecil termasuk jasa perbengkelan yang cukup banyak beroperasi di Kota Malang, yang disebabkan oleh tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor. Sektor Perdagangan Kota Malang memberikan kontribusi sebesar 5% - 5,3% tiap tahun terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur.

Di samping itu, sektor industri pengolahan juga memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto yang mencapai 25,40% lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 26,51%. Seperti diketahui bahwa Kota Malang memiliki beberapa industri besar, sedang dan kecil yang bergerak dalam bidang pengolahan tembakau, jenis industri ini memiliki kontribusi yang paling besar dibandingkan dengan jenis subsektor pengolahan lainnya yaitu sebesar 15,28%. Industri pengolahan tembakau ini memiliki tren yang menurun selama lima tahun terakhir, dimana pada tahun sebelumnya sebesar 16,12%.

Selanjutnya inflasi Kota Malang pada tahun 2017 tercatat sebesar 3,75%, yang relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Timur sebesar 4,04% dan Kota Surabaya sebesar 4,37%, tetapi lebih tinggi jika dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 3,61%.

D. SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai berikut:



1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat;
4. Badan Daerah (6 Badan):
 - a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Badan Pelayanan Pajak Daerah;
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Dinas Daerah (19 Dinas):
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Dinas Sosial;
 - f. Dinas Tenaga Kerja;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - j. Dinas Perhubungan;
 - k. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - l. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - n. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - o. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
 - p. Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah;
 - q. Dinas Perdagangan;
 - r. Dinas Perindustrian; dan
 - s. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;



6. Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Kecamatan (5 Kecamatan):
 - a. Kecamatan Kedungkandang (12 Kelurahan);
 - b. Kecamatan Sukun (11 Kelurahan);
 - c. Kecamatan Klojen (11 Kelurahan);
 - d. Kecamatan Blimbing (11 Kelurahan); dan
 - e. Kecamatan Lowokwaru (12 Kelurahan).

E. SUMBER DAYA APARATUR

Salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah aparatur dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Malang berdasarkan data SIMPEG Tahun 2017 sebanyak 7.511 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 3.720 orang dan perempuan sebanyak 3.791 orang.

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Data SIMPEG Tahun 2017

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	TOTAL
1.	SD/Sederajat	11	370	381
2.	SLTP/Sederajat	25	536	561
3.	SLTA/Sederajat	458	1.123	1.581
4.	Diploma I	9	7	16
5.	Diploma II	138	69	207
6.	Diploma III	352	122	474
7.	Strata I	2.362	1.286	3.648
8.	Strata II	362	273	635
9.	Strata III	3	5	8
JUMLAH		3.720	3.791	7.511

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah





BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013 – 2018

Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Walikota.

RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan daerah.

1. Visi

Berdasarkan kondisi Kota Malang, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 (lima) tahun mendatang, Walikota dan Wakil Walikota membuat Visi Kota Malang Tahun 2013-2018, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014



tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018, sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA
BERMARTABAT”**

Penjelasan dari Visi sebagai berikut:

Istilah MARTABAT adalah istilah yang menunjuk pada harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan visi "Menjadikan Kota Malang sebagai Kota BERMARTABAT" diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep Islam mengenai *baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur* (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT).

Untuk dapat disebut sebagai Kota BERMARTABAT, maka akan diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Malang yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.



2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bersaing di era global serta meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan;
- b. Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis potensi daerah;
- c. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis dan toleran dengan mengarusutamakan gender dan kerukunan sosial;
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan; dan
- e. Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 ditetapkan 12 (dua belas) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran, yaitu sebagai berikut:

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, dengan indikator:

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dengan target 99,63%
2. Angka Melek Huruf dengan target 99,85%



3. Angka Kelulusan SD dengan target 99,25% dan Angka Kelulusan SMP dengan target 99,68%

Sasaran:

Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan.

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan, dengan indikator Angka Harapan Usia Hidup dengan target 71,10

Sasaran:

Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Tujuan 3 : Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah dengan indikator persentase koperasi aktif dengan target 62,34%

Sasaran:

Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM; Meningkatkan kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata.

Tujuan 4 : Terwujudnya perluasan kesempatan kerja dengan indikator:

1. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dengan target 6,59%
2. Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah dengan target 9,5%



Sasaran:

Meningkatnya kesempatan kerja;

Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah.

Tujuan 5 : Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan dengan indikator ketersediaan pangan (*food availability*) dengan target:

Beras	94,000.00
Jagung	5,000.00
Kedelai	3,000.00
Daging	40,000.00
Telur	28,000.00
Susu	7,000.00
Ikan	10,000.00
Gula	16,000.00

Sasaran:

Meningkatnya ketersediaan pangan (*food availability*).

Tujuan 6 : Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan dengan indikator angka kemiskinan dengan target 3,10%.

Sasaran:

1. Menurunnya persentase penduduk miskin;
2. Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial;
3. Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana.



Tujuan 7 : Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender dengan indikator Indeks Pembangunan Gender dengan target 76,49.

Sasaran:

Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua Bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender.

Tujuan 8 : Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan sosial masyarakat dengan indikator persentase penurunan angka kriminalitas dengan target 10%.

Sasaran:

Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama;
Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.

Tujuan 9 : Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan daya dukung kota dengan indikator:

1. Predikat Adipura dengan target Piala Adipura
2. Predikat Wahana Tata Nugraha dengan target Piala Wahana Tata Nugraha

Sasaran:

Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan.

Tujuan 10 : Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya dengan target persentase luasan RTH dengan target 15,97%



Sasaran:

Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya.

Tujuan 11 : Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dengan indikator Opini BPK dengan target Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Sasaran:

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Tujuan 12 : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat dengan target Survei Kepuasan Masyarakat dengan target 78,66

Sasaran:

Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.



Tabel 2.1
Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Kota Malang

Visi : TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT				
Misi	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5
I. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bersaing di era global serta meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	1. Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	Angka Melek Huruf	1. Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
		Angka kelulusan		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
				Angka Melek Huruf
				Angka kelulusan
				Persentase anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs
	2. Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	1. Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (KH)
				Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)
				Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk)



1	2	3	4	5	
				Rasio Posyandu per Satuan Balita	
				Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis	
				Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	
II. Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis potensi daerah	1. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor ekonomi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah	Pertumbuhan PDRB	1. Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM	Persentase Koperasi Aktif	
				Persentase UKM non BPR/LKM aktif	
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		2. Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata	Persentase Usaha Mikro dan Kecil
					Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
		Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah		2. Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
					Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
	3. Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan	Ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)	1. Meningkatnya ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)	Tingkat partisipasi angkatan kerja	
				Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	
				Ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)	



1	2	3	4	5	
III. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis dan toleran dengan mengarusutamakan gender dan kerukunan sosial	1. Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan	Angka kemiskinan	1. Menurunnya persentase penduduk miskin	Angka kemiskinan	
			2. Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan penanganan	
			3. Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	
	2. Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	1. Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua Bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
	3. Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan sosial masyarakat	Angka kriminalitas	1. Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti	
				Persentase penurunan kerusuhan bermotif SARA	
				2. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	Persentase penurunan angka kriminalitas
					Persentase penindakan atas pelanggaran Perda



	1	2	3	4	5
IV.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan	1. Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan daya dukung kota	Predikat Adipura Predikat Wahana Tata Nugraha	1. Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan	Luasan kawasan kumuh Persentase jalan kota dalam kondisi baik Persentase layanan air bersih
		2. Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya	Persentase luasan RTH		1. Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya
V.	Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	1. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Opini BPK	1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK Nilai SAKIP Kota Malang Opini BPK
		2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

4. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai Visi Pemerintah Kota Malang 2013-2018, digunakan 4 (empat) strategi pokok yaitu strategi *pro growth*, *pro job*, *pro poor*, dan *pro gender*. *Pro growth* berarti, pembangunan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sejumlah instrumen seperti adanya



peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur. *Pro job* berarti pembangunan diarahkan untuk mendorong terbukanya peluang kerja bagi angkatan kerja, khususnya bagi lulusan sekolah. *Pro poor* berarti, pembangunan memiliki dimensi keberpihakan kepada Wong Cilik, yakni kelompok-kelompok masyarakat yang belum berdaya. Strategi demikian dilakukan melalui program-program perlindungan dan pemberdayaan. *Pro gender* berarti pembangunan di Kota Malang dilakukan dengan prinsip kesetaraan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan. Keempat strategi itu sekaligus berarti adanya upaya untuk menggabungkan dua strategi pokok pembangunan yang selama ini dikenal, yaitu Strategi Pertumbuhan dan Strategi Pemerataan.

Arah kebijakan pembangunan Kota Malang 2013-2018, beserta keterkaitannya dengan rumusan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang dipilih sebagaimana tercantum dalam BAB VI lampiran Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan



Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Utama. Adapun IKU Pemerintah Kota Malang sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1. Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	1. Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
		Angka Melek Huruf
		Angka kelulusan
		Persentase anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs
2. Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	2. Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (KH)
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)
		Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk)
		Rasio Posyandu per Satuan Balita
		Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis
		Angka Usia Harapan Hidup (AHH)



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
3. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor ekonomi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah	3. Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM	Persentase koperasi aktif Persentase UKM non BPR/LKM aktif Persentase Usaha Mikro dan Kecil
	4. Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
		Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
	4. Terwujudnya perluasan kesempatan kerja	5. Meningkatnya kesempatan kerja
Tingkat partisipasi angkatan kerja		
6. Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah		Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah
5. Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan	7. Meningkatnya ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)	Ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)
6. Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan	8. Menurunnya persentase penduduk miskin	Angka kemiskinan
	9. Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan penanganan
	10. Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana	Persentase korban bencana yang tertangani



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
7. Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender	11. Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
8. Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan sosial masyarakat	12. Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti
		Persentase penurunan kerusuhan bermotif SARA
	13. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	Persentase penurunan angka kriminalitas Persentase penindakan atas pelanggaran Perda
9. Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan daya dukung kota	14. Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan	Luasan kawasan kumuh
		Persentase jalan kota dalam kondisi baik
		Persentase layanan air bersih
10. Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya	15. Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya	Persentase luasan RTH
		Persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani
		Persentase luasan wilayah yang telah sesuai dengan peruntukannya



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
11. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	16. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK
		Nilai SAKIP Kota Malang
	Opini BPK	
	17. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.



Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	99,63
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	88,99
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	94,71
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	71
Angka Melek Huruf	%	99,94
Angka kelulusan		
– SD/MI	%	99,24
– SMP/MTs	%	99,67
Persentase anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs	%	100

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017
Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (KH)	-	15,5
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	-	125
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk)	-	1,1
Rasio Posyandu per Satuan Balita	-	1:102
Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis	%	77
Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71



Sasaran Strategis 3

Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017
Persentase koperasi aktif	%	79,01
Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	100
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	35

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	31,30
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	22,43

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya kesempatan kerja

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,08
Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	83

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017
Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	%	9,5



Sasaran Strategis 7

Meningkatnya ketersediaan pangan (*food availability*)

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017
Ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)		
– Beras	Ton	94.000
– Jagung	Ton	5.000
– Kedelai	Ton	3.000
– Daging	Ton	40.000
– Telur	Ton	28.000
– Susu	Ton	7.000
– Ikan	Ton	10.000
– Gula	Ton	16.000

Sasaran Strategis 8

Menurunnya persentase penduduk miskin

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017
Angka kemiskinan	%	4,40

Sasaran Strategis 9

Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017
Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan penanganan	%	19

Sasaran Strategis 10

Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017
Persentase korban bencana yang tertangani	%	100



Sasaran Strategis 11

Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua Bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	75,59
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	78,01

Sasaran Strategis 12

Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017
Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti	%	100
Persentase penurunan kerusuhan bermotif SARA	%	15

Sasaran Strategis 13

Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017
Persentase penurunan angka kriminalitas	%	10
Persentase penindakan atas pelanggaran Perda	%	100

Sasaran Strategis 14

Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017
Luasan kawasan kumuh	ha	444,60
Persentase jalan kota dalam kondisi baik	%	96
Persentase layanan air bersih	%	87
Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air	%	7,41



Sasaran Strategis 15

Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017
Persentase luasan RTH	%	15,96
Persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani	%	95
Persentase luasan wilayah yang telah sesuai dengan peruntukannya	%	58

Sasaran Strategis 16

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017
Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK	SKPD	5
Nilai SAKIP Kota Malang	-	67
Opini BPK	-	WTP

Sasaran Strategis 17

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	78,16





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja diukur dengan melakukan pengumpulan data kinerja yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Data Kinerja dimaksud dilakukan verifikasi data internal guna menjaga keakuratan data.

Kemudian capaian kinerja diukur dengan membandingkan realisasi dan target kinerja. Adapun penanggung jawab data kinerja tiap-tiap Indikator Kinerja sebagai berikut:

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Dinas Pendidikan
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Dinas Pendidikan
	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Dinas Pendidikan
	4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Dinas Pendidikan
	5. Angka Melek Huruf	Dinas Pendidikan
	6. Angka Kelulusan: - SD - SMP	Dinas Pendidikan
	7. Persentase anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs	Dinas Pendidikan



KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	1. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (KH)	Dinas Kesehatan
	2. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	Dinas Kesehatan
	3. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk)	Dinas Kesehatan
	4. Rasio Posyandu per Satuan Balita	Dinas Kesehatan
	5. Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis	Dinas Kesehatan
	6. Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	Dinas Kesehatan
Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM	1. Persentase koperasi aktif	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	2. Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	3. Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata	1. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan
	2. Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan
Meningkatnya kesempatan kerja	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Dinas Tenaga Kerja
	2. Tingkat partisipasi angkatan kerja	Dinas Tenaga Kerja
Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah	Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)	Ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB
Menurunnya persentase penduduk miskin	Angka kemiskinan	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan
Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan penanganan	Dinas Sosial
Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya kesetaraan gender	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan
	2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan
Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	1. Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	2. Persentase penurunan kerusuhan bermotif SARA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	1. Persentase penurunan angka kriminalitas	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	2. Persentase penindakan atas pelanggaran Perda	Satuan Polisi Pamong Praja



KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan	1. Luasan kawasan kumuh	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan
	2. Persentase jalan kota dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3. Persentase layanan air bersih	PDAM
	4. Persentase Titik Pantau dengan Peningkatan Kualitas Air	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya	1. Persentase luasan RTH	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2. Persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3. Persentase luasan wilayah yang telah sesuai dengan peruntukannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK	Inspektorat
	2. Nilai SAKIP Kota Malang	1. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan 2. Inspektorat 3. Sekretariat Daerah
	4. Opini BPK	Inspektorat, BPKAD
Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Bagian Organisasi



A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2015. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Malang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran kinerja meliputi perjanjian kinerja dan pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran dalam mewujudkan misi Kota Malang dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dan pengukuran kinerja dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja.



Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja Pemerintah Kota Malang, ditetapkan penilaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

85 ke atas	:	Sangat Berhasil
$70 \leq X < 85$:	Berhasil
$55 \leq X < 70$:	Cukup Berhasil
$X < 55$:	Kurang Berhasil



1. Capaian Kinerja Sasaran

Capaian Kinerja Jangka Pendek (Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017)

Adapun pengukuran kinerja dilakukan terhadap target tahunan (jangka pendek) yang dilakukan analisis terkait program dan kegiatan yang mendukung atau menghambat keberhasilannya serta permasalahan dan solusi atas keberhasilan capaian tersebut sebagai berikut:

1) Misi 1 : Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan

KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	99,63%	98,85%	99,22%
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	88,99%	84,97%	95,48%
	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	94,71%	99,90%	105,48%
	4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	71%	65,06%	91,63%
	5. Angka Melek Huruf	99,94%	98,17%	98,23%
	6. Angka Kelulusan - SD - SMP	99,24% 99,67%	93,79% 87,53%	94,51% 87,82%
	7. Persentase anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs	100%	100%	100%



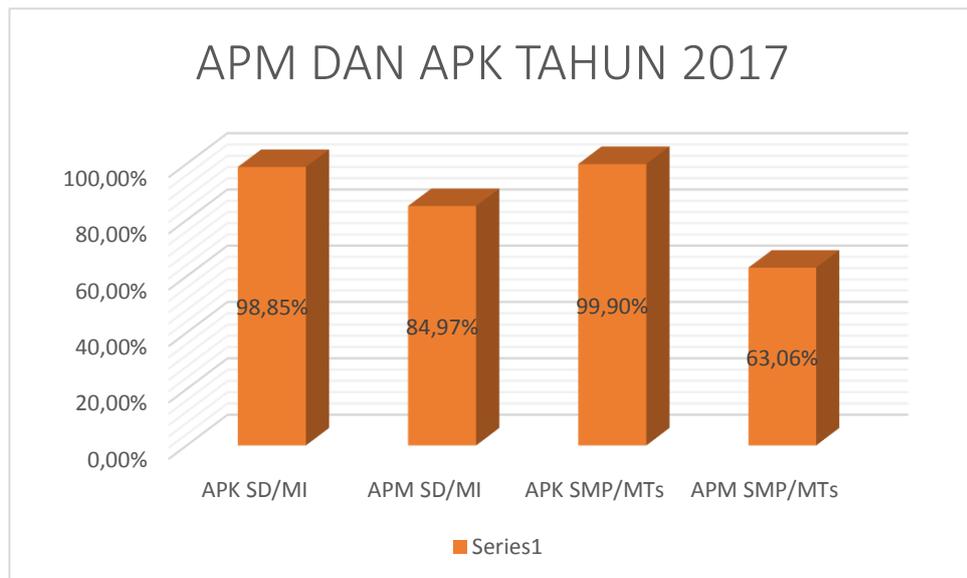
KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN
Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	1. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	15,5	6,54	158%
	2. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	125	105,80	115%
	3. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk)	1,1	1,55	140%
	4. Rasio Posyandu per Satuan Balita	1:102	1:93	110%
	5. Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis	77%	76,56%	99%
	6. Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	71	72,68	102,37%

1. Sasaran Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dengan indikator:
 - a. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, dengan formula indikator jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/MI dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7-12 tahun X 100%, tercapai 99,22% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 99,63% dengan realisasi 95,86% atau sejumlah 81.568 siswa SD dibanding 82.518 jumlah penduduk usia 7-12 tahun.
 - b. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, dengan formula indikator Jumlah penduduk usia antara 7-12 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/MI dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun, tercapai 95,48% termasuk kategori



- Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 88,99% dengan realisasi 84,97% atau sejumlah 70.116 jumlah penduduk usia antara 7-12 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/MI dibanding 82.518 jumlah penduduk usia 7-12 tahun.
- c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs, dengan formula indikator Jumlah siswa pada tingkat pendidikan SMP/MTs dibagi dengan jumlah penduduk berusia 13-15 tahun X 100%, tercapai 105,48% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 94,71% dengan realisasi 99,90% atau sejumlah 41.959 siswa SMP/MTs dibanding 42.000 jumlah penduduk usia SMP/MTs.
- d. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs, dengan formula indikator jumlah penduduk usia antara 13-15 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SMP/MTs dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun, tercapai 91,63% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 71% dengan realisasi 65,06% atau sejumlah 27.324 jumlah penduduk usia antara 13-15 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SMP/MTs dibanding 42.000 jumlah penduduk usia 13-15 tahun.



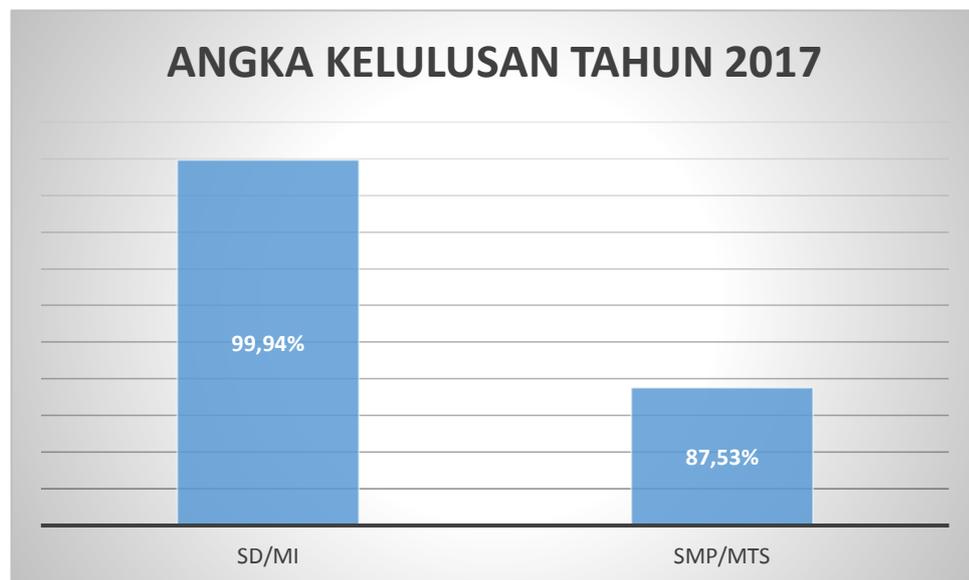


- e. Angka Melek Huruf, dengan formula indikator jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas X 100%, tercapai 98,23% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 99,94% dengan realisasi 98,17% atau diukur dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis sebanyak 695.430 jiwa dibanding jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 708.394 jiwa.
- f. Angka Kelulusan, dengan formula indikator jumlah kelulusan pada jenjang pendidikan (SD/MI, SMP/MTs) dibagi jumlah siswa tingkat tertinggi pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun ajaran berkenaan X 100%, tercapai:
- SD/MI 100,71% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 99,24% dengan realisasi 99,94% atau diukur dari jumlah kelulusan sebanyak 13.749 siswa pada tahun 2017 dibanding jumlah siswa tingkat tertinggi pada masing-masing jenjang



pendidikan sebanyak 13.757 siswa, karena terdapat 8 siswa yang tidak mengikuti ujian nasional.

- SMP/MTs 100,34% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 99,67% dengan realisasi 87,53% atau diukur dari jumlah kelulusan sebanyak 12.468 siswa pada tahun 2017 dibanding jumlah siswa tingkat tertinggi pada masing-masing jenjang pendidikan sebanyak 14.245 siswa.



- g. Persentase anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs, tercapai 100%, dengan kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 100% dengan realisasi 100% atau diukur dari anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs sejumlah 3.636 siswa lulus kelas 9 SMP/MTs dibanding 3.636 jumlah siswa pra sejahtera SD sampai SMP/MTs.



Capaian sasaran ini adalah 97,32% kategori **Sangat Berhasil**. Keberhasilannya dapat dilihat dari keberhasilan Angka Kelulusan dan Persentase Anak Usia Sekolah dari Keluarga Prasejahtera yang lulus sampai SMP/MTs. Hal tersebut mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan layanan pendidikan di Kota Malang. Sekaligus adanya pemerataan kesempatan bagi seluruh peserta didik/warga negara usia 7 – 15 tahun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Permasalahan yang muncul adalah masih belum optimalnya pemerataan sarana prasarana pendidikan, khususnya satuan pendidikan di wilayah Timur Kota Malang, yang berdampak peminat siswa lebih banyak di wilayah 4 (empat) kecamatan yang merupakan wilayah-wilayah pusat keramaian. Solusi yang dilakukan adalah perubahan sistem penerimaan siswa baru berdasarkan zona/wilayah domisili calon peserta didik, sehingga tercapai pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.

2. Sasaran Meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dengan indikator:
 - a. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup (KH) dengan formula indikator jumlah kematian bayi usia di bawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun dibagi jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama x 1.000, tercapai 158% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 15,5 dengan realisasi 6,54 atau sejumlah 76 kematian bayi dibanding 11.652 kelahiran hidup.



- b. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) dengan formula indikator banyaknya kematian ibu saat hamil, melahirkan dan nifas dibagi jumlah ibu hamil, melahirkan dan nifas X 100.000 KH, tercapai 115% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 125 dengan realisasi 105,80 atau sejumlah 14 kematian ibu saat hamil, melahirkan dan nifas dibanding 13.232 ibu hamil, melahirkan dan nifas.
- c. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk) dengan formula indikator jumlah tenaga medis X 1.000 dibagi jumlah penduduk, tercapai 140% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 1,1 dengan realisasi 1,55 atau sejumlah 1.397 tenaga medis dibanding 904.165 jumlah penduduk.
- d. Rasio Posyandu per Satuan Balita dengan formula indikator jumlah posyandu X 1.000 dibagi jumlah balita, tercapai 110% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 1:102 dengan realisasi 1:93 atau sejumlah 649 posyandu dibanding 60.343 jumlah balita.
- e. Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis dengan formula indikator jumlah penduduk miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis dibagi jumlah penduduk yang masuk kategori miskin X 100%, tercapai 99% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 77% dengan realisasi 76,56% atau sejumlah 27.478 penduduk miskin



yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis dibanding 35.890 jumlah penduduk miskin.

- f. Angka Usia Harapan Hidup (AHH), tercapai 102,40% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 70,98 dengan realisasi 72,68.

Capaian sasaran ini adalah 120,85% kategori **Sangat Berhasil**. Hal ini berarti pelayanan kesehatan dasar yang meliputi penyediaan sarana prasarana, pelayanan dan kesadaran masyarakat sudah meningkat.

2) Misi 2 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor ekonomi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah

KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN
Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM	1. Persentase koperasi aktif	59,32%	46,50%	78,38%
	2. Persentase UKM Non BPR/LKM aktif	100%	100%	100%
	3. Persentase Usaha Mikro dan Kecil	35%	32,04%	91,54%
Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata	1. Kontribusi sektor perdagangan, terhadap PDRB	31,30%	31,25%	99,84%
	2. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	22,43%	23,62%	105%



1. Sasaran Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM dengan indikator:
 - a. Persentase koperasi aktif, dengan capaian 78,38% termasuk kategori **Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 59,32% dengan realisasi 46,50%.
 - b. Persentase UKM Non BPR/LKM aktif, dengan capaian 100% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 100% dengan realisasi 100%.
 - c. Persentase Usaha Mikro dan Kecil, dengan capaian 91,54% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 35% dengan realisasi 32,04%.

Capaian sasaran ini adalah 89,97% kategori **Sangat Berhasil**.

2. Sasaran Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata, dengan indikator:
 - a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, tercapai 99,84%.
Capaian ini diukur dari realisasi 31,25% dari target 31,30%.
 - b. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB, tercapai 105%, dari perhitungan target 22,43% dengan realisasi 23,62%.

Capaian sasaran ini adalah 102,42% kategori **Sangat Berhasil**.



Tujuan 2 : Terwujudnya perluasan kesempatan kerja

KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN
Meningkatnya kesempatan kerja	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,70%	7,22%	92,24%
	2. Tingkat partisipasi angkatan kerja	83%	94%	113,09%
Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah	Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	9,5%	10,50%	110%

1. Sasaran Meningkatkan kesempatan kerja dengan indikator:

- a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), tercapai 92,24%, capaian ini diukur dari realisasi TPT 7,22% dari target 6,70%. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017 mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,28%. Dimana jumlah angkatan kerja yang menganggur tahun 2016 sebanyak 43.583 orang dan pada tahun 2017 menjadi 43.488 orang. Sedangkan jumlah angkatan kerja usia 15 – 59 tahun sebanyak 602.330 orang.
- b. Tingkat partisipasi angkatan kerja, tercapai 113,09%, capaian ini diukur dari realisasi 94% dari target 83%. Realisasi indikator ini diperoleh dari Jumlah Angkatan Kerja keseluruhan (usia 15 – 59 tahun) sejumlah 664.906 orang dibandingkan Jumlah Angkatan kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja sejumlah 708.394 orang.

Capaian sasaran ini adalah 102,67% kategori **Sangat Berhasil**.



Keberhasilan sasaran ini didukung Program/Kegiatan yang dilaksanakan di Kota Malang antara lain *Job Market Fair (Job Fair)* Kota Malang yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja pada bulan agustus tahun 2017 dan kegiatan lain yang sejenis. Dalam kegiatan yang digelar bekerja sama dengan perusahaan lokal dan nasional tersebut diharapkan mampu menyerap tenaga kerja di wilayah kota Malang.



2. Sasaran Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah dengan indikator:

Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah, tercapai 110%

Capaian ini diukur dari realisasi 10,50% dari target 9,5%.

Capaian sasaran ini adalah 110% kategori **Sangat Berhasil**. Hal ini menunjukkan bahwa investasi di Kota Malang tumbuh pesat, yang berarti adanya kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Kota Malang. Ditandai tumbuhnya investasi di bidang usaha perhotelan, properti dan jasa lainnya. Tentunya ini adalah sebuah potret (realita) yang mencerminkan kondisi Kota Malang yang sangat kondusif bagi perkembangan iklim investasi.



Tujuan 3 : Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan

KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN
Meningkatnya ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)	Ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)			
	1. Beras	94.000	95.445,46	101,54%
	2. Jagung	5.000	5.018,56	100,37%
	3. Kedelai	3.000	2.509,28	83,64%
	4. Daging	40.000	44.413,42	111,03%
	5. Telur	28.000	28.852,45	103,04%
	6. Susu	7.000	7.056,82	100,81%
	7. Ikan	10.000	10.122,77	101,23%
	8. Gula	16.000	16.914,10	105,71%

Sasaran Meningkatkan ketersediaan pangan (*food availability*) dengan indikator Ketersediaan pangan (*food availability*) rata-rata terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian sasaran ini adalah 100,92% kategori **Sangat Berhasil**.

3) Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan

KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN
Menurunnya persentase penduduk miskin	Angka kemiskinan	3,48%	4,17%	80,17%
Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan penanganan	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan penanganan	19%	18%	92,26%



KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN
Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	100%	100%	100%

1. Sasaran Menurunnya persentase penduduk miskin dengan indikator:

Angka kemiskinan, dengan capaian 80,17% termasuk kategori **Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 3,48% dengan realisasi 4,17%.

2. Sasaran Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial, dengan indikator:

Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan penanganan, tercapai 92,26% termasuk kategori **Sangat Berhasil**;

Capaian ini diukur dari realisasi 18% dari target 19%. Keberhasilan sasaran ini didukung dengan Kegiatan dalam bentuk Bimbingan Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ODKB) melalui Pembinaan dan Pelatihan Penanganan bagi Orang Tua Anak (*Family Support and Parenting Skill*). Dimana dengan kegiatan tersebut dapat memberikan pemahaman kepada orang tua maupun keluarga tentang hak anak disabilitas (cacat), mencegah timbulnya kecacatan baru bagi anak, meningkatkan kepercayaan diri dan keceriaan anak disabilitas dalam menjalani perawatan/rehabilitasi medis dan sosial serta memberikan perlindungan dan meningkatkan kualitas hidup anak disabilitas.



3. Sasaran Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana, dengan indikator:

Persentase korban bencana yang tertangani, tercapai 100%, termasuk kategori **Sangat Berhasil**;

Capaian ini diukur dari realisasi 100% atau seluruh korban bencana sejumlah 148 orang dapat tertangani. Keberhasilan sasaran ini didukung dengan kegiatan penanganan korban bencana yang dilaksanakan setiap terjadi bencana yang senantiasa dilakukan penanganan dan pemberian bantuan oleh Pemerintah Kota Malang kepada masyarakat yang tertimpa bencana. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi tanggap darurat (siap siaga) bencana oleh aparatur Pemerintah Kota Malang dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender

KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua Bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	75,59	96,76	128,01%
	2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	78,01	74,87	95,97%
Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	1. Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	2. Persentase penurunan kerusuhan bermotif SARA	15%	100%	100%



1. Sasaran Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua Bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender dengan indikator:

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG), tercapai 128,01%

Capaian ini diukur dari realisasi IPG 96,76 dari target 75,59.

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), tercapai 95,97%

Capaian ini diukur dari realisasi IDG 74,87 dari target 78,01.

Capaian sasaran ini adalah 111,99% kategori **Sangat Berhasil**.

2. Sasaran Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama dengan indikator:

a. Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti, tercapai 100%.

Capaian ini diukur dari realisasi 100% tindak lanjut dari kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama (dalam hal ini diwakili oleh tokoh/pemuka agama yang tergabung dalam Forum Komunikasi Umat Beragama) dari target 100%.

b. Persentase penurunan kerusuhan bermotif SARA, tercapai 100%.

Capaian ini diukur dari realisasi 0 kejadian dari target penurunan 1 kejadian bermotif SARA.

Capaian sasaran ini adalah 100% yang dalam kategori **Sangat Berhasil**.



Tujuan 3 : Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan sosial masyarakat

KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN
Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	1. Persentase penurunan angka kriminalitas	10%	9,07%	109,28%
	2. Persentase penindakan atas pelanggaran Perda	100%	91,98%	91,98%

Sasaran Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib dengan indikator:

a. Persentase penurunan angka kriminalitas, tercapai 109,28%.

Capaian ini diukur dari realisasi penurunan angka kriminalitas 9,07% dari target 10%.

b. Persentase penindakan atas pelanggaran Perda, tercapai 91,98%.

Capaian ini diukur dari realisasi 91,98% dari target 100%.

Capaian sasaran ini adalah 100,63% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

4) Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan daya dukung kota



KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan	1. Luasan kawasan kumuh	444,60 hektar	479,85 hektar	92,07%
	2. Persentase jalan kota dalam kondisi baik	97%	85,04%	88%
	3. Persentase layanan air bersih	90%	66,11%	73,45%

Sasaran Meningkatkan kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan, dengan indikator:

- a. Luasan kawasan kumuh, dengan formula indikator Jumlah seluruh luasan kawasan kumuh, tercapai 92,07% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 444,60 Ha, dengan realisasi 479,85 Ha.
- b. Persentase jalan kota dalam kondisi baik, dengan formula indikator Jumlah kumulatif panjang jalan memenuhi kondisi jalan baik dan sedang dibagi jumlah kumulatif panjang jalan X 100%, tercapai 88% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 97%, dengan realisasi 85,04% atau panjang jalan dalam kondisi baik 1.038,6 km dibanding panjang jalan keseluruhan 1.221,29 km.
- c. Persentase layanan air bersih, dengan formula indikator Jumlah KK yang mendapat pelayanan air bersih dibagi jumlah seluruh KK X 100%, tercapai 73,45% termasuk kategori **Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 87%, dengan realisasi 66,11% atau 188.755 KK yang mendapat pelayanan air bersih dibanding 285.534 KK.



Capaian sasaran ini adalah 84,40% dimana termasuk kategori **Berhasil**.

Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan kinerja Pemerintah Kota Malang dalam menurunkan luasan kawasan kumuh di wilayah Kota Malang dari realisasi tahun 2016 seluas 494,65 Ha menjadi 479,85 Ha pada tahun 2017. Tentunya diharapkan luasan kawasan kumuh dimaksud dapat menurun setiap tahun.

Sedangkan pemeliharaan jalan yang dilakukan memberikan dampak yang signifikan dalam memberikan pelayanan masyarakat, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman dalam menggunakan fasilitas jalan.

Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah masih belum optimalnya pemerataan air bersih untuk seluruh keluarga.

Solusi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pasokan air bersih bagi masyarakat dengan debit air yang cukup memadai melalui program efektivitas dan efisiensi penyediaan tandon-tandon air di dataran tinggi dan pipanisasi, yang mampu memberikan distribusi aliran air bersih pada tiap-tiap rumah tinggal.

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang

KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN
Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya	1. Persentase luasan RTH	15,96%	12,38%	77,59%
	2. Persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani	95%	93%	98%
	3. Persentase luasan wilayah yang telah sesuai dengan peruntukannya	100%	100%	100%



KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN
	4. Persentase Titik pantau dengan peningkatan kualitas air	7,41%	3,70%	50%

Sasaran Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya, dengan indikator:

- a. Persentase luasan RTH, dengan formula indikator Luasan ruang terbuka hijau dibagi luasan wilayah X 100%, tercapai 77,59% termasuk kategori **Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 15,96%, dengan realisasi 12,38% atau 1.363 Ha luasan ruang terbuka hijau dibanding luas wilayah 11.006 Ha.
- b. Persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani, dengan formula indikator jumlah pelanggaran tata ruang yang tertangani dibagi jumlah seluruh pelanggaran tata ruang X 100%, tercapai 98% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 95%, dengan realisasi 93% dengan jumlah 102 pelanggaran.
- c. Persentase luasan wilayah yang telah sesuai dengan peruntukannya, dengan formula indikator Jumlah pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan peruntukannya dibagi jumlah seluruh wilayah yang telah dimanfaatkan x 100%, tercapai 100% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 100%, dengan realisasi 100%.
Capaian sasaran ini adalah 94,3% kategori **Sangat Berhasil**.
- d. Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air, dengan formula indikator Jumlah titik pantau peningkatan kualitas air dibandingkan tahun



sebelumnya dibagi jumlah titik pantau x 100%, tercapai 50% termasuk kategori **Kurang Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 7,41%, dengan realisasi 3,70%. Capaian sasaran ini adalah 84,40% kategori **Berhasil**.

5) Misi 5 : Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

Tujuan 1 : Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK	5	0	0
	2. Nilai SAKIP Kota Malang	67	70.96	106%
	3. Opini BPK	WTP	WTP	100%

Sasaran Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dengan indikator:

a. Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK, dengan capaian 0% termasuk kategori **Tidak Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 5 Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai WBK namun belum terealisasi. Ketidakberhasilan ini bukan berarti tidak ada kinerja yang dihasilkan dari Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Malang, hal tersebut dikarenakan nilai survei kepuasan eksternal pada saat penilaian oleh Tim Reformasi Birokrasi Kementerian PAN & RB terhadap 3 (tiga) Perangkat Daerah yang telah dicanangkan sebagai *pilot project* Zona Integritas pada Tahun 2015 belum memenuhi indikator sebagai



WBK (Wilayah Bebas Korupsi). Ketiga Perangkat Daerah tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pelayanan Pajak Daerah, dan Kecamatan Klojen. Sebagai langkah perbaikan sekaligus dalam rangka pemenuhan kriteria WBK maka Pemerintah Kota Malang akan menerapkan langkah-langkah strategis antara lain:

1. Menyelenggarakan pembinaan secara berkesinambungan serta mendorong segenap Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik guna senantiasa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, terutama 3 (tiga) Perangkat Daerah yang telah diusulkan menjadi WBK;
 2. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik;
 3. Pembinaan dan pengawasan oleh APIP secara konsisten dan obyektif.
- b. Nilai SAKIP Kota Malang, dengan capaian 106% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, dimana dari target nilai SAKIP 67 terealisasi 70,96.

Keberhasilan ini didukung dengan komitmen Pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, yaitu kegiatan evaluasi SAKIP dan Bimtek Penyusunan Renstra, kegiatan Bimtek dan FGD RKPD, dan Reviu RPJMD



c. Opini BPK, dengan capaian 100%, dengan kategori **Sangat Berhasil**, dimana dari target opini WTP terealisasi WTP.

Capaian sasaran ini adalah 68,64% kategori **Cukup Berhasil**.

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	78,16	78,44	100,36%

Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, dengan indikator:

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan capaian 100,36% termasuk kategori **Sangat Berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 78,16 nilai SKM terealisasi 78,44. Capaian keberhasilan ini didukung komitmen Pemerintah Kota Malang dalam mematuhi ketentuan tentang pelaksanaan Standar Pelayanan.



2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Misi 1 : Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2016	REALISASI 2017
Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	95,86%	98,85%
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	82,79%	84,97%
	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	85,13%	99,90%
	4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	62,99%	65,06%
	5. Angka Melek Huruf	99,91%	98,17
	6. Angka Kelulusan - SD - SMP	100% 100%	99,94% 87,53%
	7. Persentase anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs	100%	100%



Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2016	REALISASI 2017
Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	1. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (KH)	9,54	6,54
	2. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	67,13	105,80
	3. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk)	1,24	1,55
	4. Rasio Posyandu per Satuan Balita	1:111	1:93
	5. Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis	68%	76,56%
	6. Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	72,60	72,68



Misi 2 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2016	REALISASI 2017
Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM	1. Persentase koperasi aktif	43,45%	46,50%
	2. Persentase UKM NON BPR/LKM aktif	100%	100%
	3. Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap UKM	30,38%	32,04%
Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata	1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	31,04%	31,25%
	2. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	24,46%	23,62%

Tujuan 2 : Meningkatnya kesempatan kerja

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2016	REALISASI 2017
Meningkatnya kesempatan kerja	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,28%	7,22%
	2. Tingkat partisipasi angkatan kerja	94%	94%
Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah	Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	11,11%	10,50%
Meningkatnya ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)	Ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)		
	1. Beras	91.517,36	95.445
	2. Jagung	5.347,55	5.018
	3. Kedelai	6.327,33	2.509
	4. Daging	7.072,33	44.413
	5. Telur	16.819,94	28.852
	6. Susu	6.979,28	7.056
	7. Ikan	34.888,93	10.122
	8. Gula	9.568,95	16.914



Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2016	REALISASI 2017
Menurunnya persentase penduduk miskin	Angka kemiskinan	4,33%	4,17%
Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan penanganan	37%	18%
Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	100%	100%

Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya kesetaraan gender

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2016	REALISASI 2017
Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya kesetaraan gender	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,26	96,76
	2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	41,48	74,87
Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	1. Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti	100%	100%
	2. Persentase penurunan kerusuhan bermotif SARA	87,5%	0%



Tujuan 3 : Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2016	REALISASI 2017
Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	1. Persentase penurunan angka kriminalitas	12,34%	9,07%
	2. Persentase penindakan atas pelanggaran Perda	82,26%	91,98%

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan daya dukung kota

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2016	REALISASI 2017
Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan	1. Luasan kawasan kumuh	494,647	479,85
	2. Persentase jalan kota dalam kondisi baik	84,88%	85,04%
	3. Persentase layanan air bersih	65,64%	66,11%
	4. Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air	3,70%	3,70%



Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2016	REALISASI 2017
Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya	1. Persentase luasan RTH	12,38%	12,38%
	2. Persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani	100%	93%
	3. Persentase luasan wilayah yang telah sesuai dengan peruntukannya	100%	100%

Misi 5 : Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

Tujuan 1 : Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2016	REALISASI 2017
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK	0	0
	2. Nilai SAKIP Kota Malang	70,95	70,96
	3. Opini BPK	WTP	WTP



Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2016	REALISASI 2017
Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	73,95	78,44

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen yang Merupakan Kemajuan Pencapaian Target Jangka Menengah

Kemajuan pencapaian target jangka menengah adalah kemajuan pencapaian target kinerja tiap-tiap indikator kinerja dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD, sedangkan Capaian Kinerja jangka menengah adalah tahapan membandingkan antara Realisasi **sampai dengan** Tahun 2017 dibandingkan target lima tahunan.

Capaian kinerja jangka menengah yang merupakan tingkat kemajuan pencapaian target jangka menengah sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan



SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2017	KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2017 DENGAN TARGET 5 TAHUNAN
Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	98,85%	99,63%	99,22%
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	84,97%	89,03%	95,44%
	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	99,90%	95,01%	105,15%
	4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	65,06%	72%	90,36%
	5. Angka Melek Huruf	98,17%	99,95 %	98,21%
	6. Angka Kelulusan - SD - SMP	93,94% 87,53%	99,25% 99,68%	100,70% 87,81%
	7. Persentase anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs	100%	100%	100%

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2017	KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2017 DENGAN TARGET 5 TAHUNAN
Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	1. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	6,54	15	156,42%
	2. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	105,80	120	111,83%



SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2017	KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2017 DENGAN TARGET 5 TAHUNAN
	3. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk)	1,1	1,12	137,95%
	4. Rasio Posyandu per Satuan Balita	1:93	1:101	108,60%
	5. Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis	76,56%	78%	98,16%
	6. Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	72,68	71,10	102,22%

Misi 2 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2017	KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2017 DENGAN TARGET 5 TAHUNAN
Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM	1. Persentase koperasi aktif	46,50%	62,34%	74,59%
	2. Persentase UKM non BPR/LKM aktif	100%	100%	100%
	3. Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap UKM	32,04%	40%	80%



SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2017	KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2017 DENGAN TARGET 5 TAHUNAN
Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata	1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	31,25%	31,40%	99,52%
	2. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	23,62%	21,56%	109,55%

Tujuan 2 : Terwujudnya perluasan kesempatan kerja

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2017	KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2017 DENGAN TARGET 5 TAHUNAN
Meningkatnya kesempatan kerja	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,22%	6,59%	109,56%
	2. Tingkat partisipasi angkatan kerja	83%	85%	110,42%
Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah	Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	10,50%	9,5%	110%

Tujuan 3 : Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2017	KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2017 DENGAN TARGET 5 TAHUNAN
Meningkatnya ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)	Ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)			
	- Beras	95.445,46	94.000,00	101,54
	- Jagung	5.018,56	5.000,00	100,37
	- Kedelai	2.509,28	3.000,00	83,64
	- Daging	44.413,42	40.000,00	111,03
	- Telur	28.852,45	28.000,00	103,04
	- Susu	7.056,82	7.000,00	100,81
	- Ikan	10.122,77	10.000,00	101,23
- Gula	16.914,10	16.000,00	105,71	



Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2017	KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2017 DENGAN TARGET 5 TAHUNAN
Menurunnya persentase penduduk miskin	Angka kemiskinan	4,17%	3,10%	134,52%
Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental sert lanjut usia tidak potensial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan penanganan	18%	21%	83,47%
Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	100%	100%	100%



Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2017	KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2017 DENGAN TARGET 5 TAHUNAN
Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya kesetaraan gender	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,76	76,49	126,50%
	2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,87	78,91	94,88%
Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	1. Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	2. Persentase penurunan kerusuhan bermotif SARA	100%	15%	100%

Tujuan 3 : Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan sosial masyarakat

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2017	KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2017 DENGAN TARGET 5 TAHUNAN
Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	1. Persentase penurunan angka kriminalitas	9,07%	10%	90,72%
	2. Persentase penindakan atas pelanggaran Perda	91,98%	100%	91,98%



Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan

Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan daya dukung kota

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2017	KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2017 DENGAN TARGET 5 TAHUNAN
Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan	1. Luasan kawasan kumuh	479,85	389,60	76,84%
	2. Persentase jalan kota dalam kondisi baik	85,04%	98%	86,78%
	3. Persentase layanan air bersih	66,11%	95%	69,59%
	4. Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air	3,70%	11,11%	33,34%

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2017	KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2017 DENGAN TARGET 5 TAHUNAN
Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya	1. Persentase luasan RTH	12,39%	15,97%	77,55%
	2. Persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani	93,14%	95%	98,04%
	3. Persentase luasan wilayah yang telah sesuai dengan peruntukannya	100%	100%	100%



Misi 5 : Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

Tujuan 1 : Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2017	KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2017 DENGAN TARGET 5 TAHUNAN
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK	0	6	0%
	2. Nilai SAKIP Kota Malang	70,96	68	104,35
	3. Opini BPK	WTP	WTP	100%

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2017	KONDISI AKHIR RPJMD TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2017 DENGAN TARGET 5 TAHUNAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	70,96	78,66	99,72%



4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Daerah Sekitar

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERBANDINGAN REALISASI DENGAN DAERAH SEKITAR	
		KOTA MALANG	KOTA BATU
Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	98,85%	105%
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	84,97%	94,8%
	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	99,90%	106,8%
	4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	65,06%	65,06%
	5. Angka Melek Huruf	98,17%	100%
	6. Angka Kelulusan: - SD - SMP	93,79% 87,53%	100% 100%
Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	1. Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (KH)	6,54	3,66
	2. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	105,80	99,73
	3. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk)	1,55	31,14
	4. Rasio Posyandu per Satuan Balita	1:93	1:20
	5. Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis	76,56%	49,89
	6. Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	72,68	77,73%



KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERBANDINGAN REALISASI DENGAN DAERAH SEKITAR	
		KOTA MALANG	KOTA BATU
Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM	1. Persentase koperasi sehat	46,50%	65%
	2. Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap UKM	32,04%	90,87%
	3. Kontribusi sektor perdagangan, terhadap PDRB	31,25%	18,08%
	4. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	23,62%	4,65%
Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,22%	4,29%
Menurunnya persentase penduduk miskin	Angka kemiskinan	4,17%	4,71%
Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	100%	100%
Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya kesetaraan gender	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,76	89,47
	2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,87	77,68
Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	1. Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti	100%	100%
	2. Persentase penurunan kerusuhan bermotif SARA	100%	100%



KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERBANDINGAN REALISASI DENGAN DAERAH SEKITAR	
		KOTA MALANG	KOTA BATU
Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan	1. Persentase jalan kota dalam kondisi baik	85,04%	54,90%
	2. Persentase layanan air bersih	66,11%	73%
Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya	Persentase luasan wilayah yang telah sesuai dengan peruntukannya	100%	73%



Penghargaan tingkat nasional yang diperoleh Pemerintah Kota Malang selama Tahun 2017 sebagai berikut:

1. WAHANA TATA NUGRAHA

2017 - dari Presiden Republik Indonesia atas keberhasilan penataan model transportasi di Kota Malang



2. Adipura Kencana - dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diberikan kepada Pemerintah Kota Malang

3. Adiwiyata Mandiri

dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diberikan kepada 3 (tiga) sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Malang (SMAN 2, SMAN 7, dan SMPN 15) atas peran sertanya menjaga kebersihan lingkungan





4. *Smesco Award 2017* dari Menteri Koperasi dan UKM Atas Dukungan Terhadap Pemasaran Global Produk UKM Daerah di Smesco Indonesia Jakarta

5. **Swasti Saba Wistara 2017** dari Menteri Kesehatan Atas Keberhasilan dalam menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2017 untuk Klasifikasi Pengembangan



6. Opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas **Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang** Tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan

7. **Penghargaan atas Nilai Evaluasi SAKIP** Pemerintah Kota Malang dengan Kategori BB dari Kementerian PAN dan RB



B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun 2017 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, pagu dan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017			
Uraian	Pagu	Realisasi	Capaian
Pendapatan Daerah	1.915.269.662.466,56	1.904.539.343.501,98	99,44%
Belanja Daerah	2.100.230.441.533,63	1.746.539.609.577,97	83,16%

Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Penerimaan yang Sah, pada Tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp. 1.915.269.662.466,56 dan realisasi sebesar Rp. 1.904.539.343.501,98 (99,44%).

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017

NO.	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PENCAPAIAN (%)
1.	Pendapatan Asli Daerah	514.963.444.965,56	520.899.647.925,98	101,15
2.	Dana Perimbangan	1.212.681.404.287,00	1.174.719.580.753,00	96,87
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	187.624.813.214,00	208.920.114.823,00	111,35
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.915.269.662.466,56	1.904.539.343.501,98	99,44%



a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp. 514.963.444.965,56 dan realisasi sebesar Rp. 520.899.647.925,98 (101,15%).

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017

NO.	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PENCAPAIAN (%)
1.	Hasil Pajak Daerah	352.500.000.000,00	414.961.528.718,04	117,72
2.	Hasil Retribusi Daerah	44.883.710.400,00	45.493.054.750,04	101,36
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.716.683.768,14	16.490.014.841,36	104,92
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	101.863.050.797,42	43.955.049.616,54	43,15
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		514.963.444.965,56	520.899.647.925,98	101,15

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus ditargetkan sebesar Rp. 1.212.681.404.287,00 dan realisasi/penerimaan sebesar Rp. 1.174.719.580.753,00 (96,87%).

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Dana Perimbangan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 5
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2017

NO.	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PENCAPAIAN (%)
1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	129.685.476.321,00	113.684.568.188,00	87,66
2.	Dana Alokasi Umum	844.576.425.000,00	844.576.426.000,00	100,00
3.	Dana Alokasi Khusus	238.419.502.966,00	216.458.586.565,00	90,79
	Jumlah Dana Perimbangan	1.212.681.404.287,00	1.174.719.580.753,00	96,87

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya tahun anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp. 187.624.813.214,00 dengan realisasi sebesar Rp. 208.920.114.823,00 atau 111,35%.

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2017

NO.	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PENCAPAIAN (%)
1.	Pendapatan Hibah	25.000.000.000,00	10.305.000.000,00	41,22
2.	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	152.350.883.214,00	188.341.184.823,00	123,62
4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00
5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	2.773.930.000,00	2.773.930.000,00	100,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	187.624.813.214,00	208.920.114.823,00	111,35



Belanja Daerah Tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp. 2.100.230.441.533,63 dengan realisasi sebesar Rp. 1.746.539.609.577,97 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung ditargetkan sebesar Rp. 878.836.735.139,58 dengan realisasi sebesar Rp. 778.379.835.897,26 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.221.393.706.394,05 dengan realisasi sebesar Rp. 968.159.773.680,71 sehingga ada penghematan sebesar Rp. 353.690.831.955,66.

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Belanja Daerah tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017

NO.	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PENCAPAIAN (%)
1.	Belanja Tidak Langsung	878.836.735.139,58	778.379.835.897,26	88,57
1.1.	Belanja Pegawai	779.816.091.047,28	691.770.586.889,86	88,71
1.2.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
1.3.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
1.4.	Belanja Hibah	90.126.520.000,00	85.967.500.000,00	95,39
1.5.	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	0,00	0,00
1.6.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	100.000.000,00	6.484.050,00	6,48
1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	663.728.700,00	635.264.957,40	95,71
1.8.	Belanja Tidak Terduga	7.630.395.392,30	0,00	0,00
2.	Belanja Langsung	1.221.393.706.394,05	968.159.773.680,71	79,27
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.100.230.441.533,63	1.746.539.609.577,97	83,16

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dari pengukuran kinerja keuangan per sasaran,



yang dihitung dengan membandingkan pagu anggaran dan realisasi, dapat dianalisis tingkat efisiensi anggaran dari masing-masing capaian sasaran sebagai berikut:

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	196.178.389.508,00	124.144.552.686,80	63,28%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 77,86%, dengan kategori **Berhasil**.

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	122.035.927.196,15	97.046.854.020,68	79,52%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 120,85%, dengan kategori **Sangat Berhasil** maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 20,48%.

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah	Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM	7.100.679.000,00	6.614.464.882,00	93,15%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 89,97%, dengan kategori **Sangat Berhasil**.



Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata	32.105.970.500,00	27.705.455.089,00	86,29%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 102,57%, dengan kategori **Berhasil** maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 13,71%.

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya kesempatan kerja	4.111.210.000,00	2.271.551.600,00	55,25%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 102,66%, dengan kategori **sangat berhasil** maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 44,75%.

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah	7.020.000.000,00	5.039.748.908,00	71,79%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 110%, dengan kategori **Sangat Berhasil** maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 28,21%

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah	Meningkatnya ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)	5.421.980.000,00	4.706.025.312,00	86,80%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 100,92%, dengan kategori **Sangat Berhasil** maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 13,20%



Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial	Menurunnya penduduk miskin	14.626.603.700,00	11.747.189.949,00	80,31%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 80,17%, dengan kategori **Berhasil**.

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	2.719.112.900,00	2.598.858.000,00	95,58

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 92,26%, dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana	7.189.535.000,00	6.165.789.968,00	85,76%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 100%, dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya kesetaraan gender.	7.265.265.000,00	6.543.295.953,00	90,06%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 111,99%, dengan kategori **sangat berhasil** maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 9,94%



Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	17.083.500.000,00	16.368.710.899,00	95,82%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 100%, dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	18.350.570.000,00	16.034.364.127,00	87,38%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 100,63%, dengan kategori **Sangat Berhasil** maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 12,62%.

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan	359.789.006.612,99	293.166.823.230,97	81,48%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 75,79%, dengan kategori **Berhasil**.

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya	15.931.136.000,00	14.887.781.175,00	93,45%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 91,88%, dengan kategori **Sangat Berhasil**.



Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	33.770.480.706,00	28.436.216.193,00	84,20%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 68,64%, dengan kategori **Cukup Berhasil**.

Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	370.694.340.270,91	304.682.091.687,26	82,19%

Pada Sasaran ini dengan rata-rata capaian indikator 100,36%, dengan kategori **Sangat Berhasil** maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 17,81%.

Secara umum dari masing-masing sasaran telah tercapai dengan kategori **Sangat Berhasil** (Rata-Rata Capaian 90%) dengan menggunakan anggaran Rp. 968.159.773.680,71 dari pagu anggaran Rp. 1.221.393.706.394,05, sehingga terdapat efisiensi anggaran Rp. 253.233.932.713,34 atau 20,73%.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI DALAM PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Pada Misi 4 Sasaran Meningkatkan kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan pada indikator Luasan kawasan kumuh capaiannya cukup berhasil (92,60 %) dikarenakan masih tingginya cakupan kawasan dimaksud (479,85 hektar) dibandingkan target yang diharapkan (444,60 hektar). Guna



mengatasi hal tersebut akan terus dilaksanakan peningkatan kualitas lingkungan terhadap kawasan dimaksud, seperti perbaikan prasarana air minum, penerangan jalan, sanitasi, saluran air hujan/limbah (drainase), dan jalan lingkungan. Contoh program nyata penanganan kawasan kumuh yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kota Malang adalah pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah Domestik Komunal di beberapa kelurahan seperti pada Kelurahan Buring, Kelurahan Ciptomulyo, dan Kelurahan Tulusrejo. Pemerintah Kota Malang juga senantiasa mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan (inovasi dan kreasi) masyarakat terhadap lingkungannya. Sebagai buktinya adalah keberhasilan peremajaan/penataan kawasan padat penduduk di Kelurahan Jodipan (Kampung Warna-Warni) dan Kelurahan Kesatrian (Kampung Tiga Dimensi/Tridi) Kecamatan Blimbing. Kedua kawasan tersebut ditata sedemikian rupa sehingga menjadi destinasi wisata (bahkan ikon wisata Kota Malang baru) yang menarik minat wisatawan domestik dan mancanegara. Hal tersebut memberikan manfaat/berdampak secara langsung pada:

1. Perubahan perilaku/pola hidup masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan;
2. Peningkatan perekonomian/kesejahteraan bagi masyarakat sekitar melalui kunjungan wisatawan;
3. Pengurangan kawasan kumuh melalui penataan lingkungan.

Pada Misi 5 Sasaran Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah pada indikator Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) masih belum dapat tercapai karena nilai survei kepuasan eksternal pada saat penilaian oleh Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap 3 (tiga) Perangkat Daerah pada tahun 2017 belum memenuhi indikator sebagai WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi). Untuk selanjutnya sebagai langkah perbaikan



sekaligus guna mendukung pencapaian sasaran dimaksud Pemerintah Kota Malang akan berupaya menerapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembinaan secara berkesinambungan serta mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk melaksanakan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012;
2. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik;
3. Pembinaan dan evaluasi oleh APIP dilaksanakan secara konsisten dan objektif;
4. Menyusun rencana aksi perbaikan untuk mencapai WBK.

Kebijakan ini perlu didukung dengan komitmen segenap elemen Pemerintah Kota Malang untuk mewujudkan reformasi birokrasi khususnya dalam hal pelayanan publik sekaligus meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.





BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama, secara umum capaian kinerja masing-masing sasaran dalam kategori Sangat Berhasil. Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung adanya kerja sama yang sinergis dari seluruh jajaran Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait, sehingga Kota Malang pada tahun 2017 berdasarkan hasil evaluasi Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mendapatkan nilai BB (Kategori Sangat Baik).

Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja telah dilakukan analisis dan evaluasi, sehingga diketahui langkah-langkah strategis yang dilaksanakan dalam meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Malang yang menggambarkan Capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada Tahun 2017 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Malang.

Malang, 23 Maret 2018



Pjs. WALIKOTA MALANG,
Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT





PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. MOCH. ANTON

Jabatan : WALIKOTA MALANG

Pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perubahan perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Malang, 13 Oktober 2017

WALIKOTA MALANG,

H. MOCH. ANTON

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PEMERINTAH KOTA MALANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	99,63%
		2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	88,99%
		3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	94,71%
		4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	71,00%
		5. Angka Melek Huruf	99,94%
		6. Persentas Angka kelulusan - SD/MI - SMP/MTs	99,24% 99,67%
		7. Persentase anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah sampai dengan SMP/MTs	100%
2.	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	1. Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (KH)	15,5
		2. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	125
		3. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk)	1,1
		4. Rasio Posyandu per Satuan Balita	1:102
		5. Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis	77%
		6. Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	71
3.	Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM	1. Persentase koperasi aktif	79,01%
		2. Kontribusi UKM terhadap Total PDRB	54,73%
4.	Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata	1. Persentase sektor perdagangan, akomodasi dan makanan terhadap total PDRB	39,99%
		2. Persentase sektor industri pengolahan terhadap total PDRB	32,02%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
5	Meningkatnya kesempatan kerja	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,08%
		2. Tingkat partisipasi angkatan kerja	83%
6.	Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah	Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	5%
7.	Meningkatnya ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)	Ketersediaan pangan (<i>food availability</i>) Beras (ton) Jagung (ton) Kedelai (ton) Daging (ton) Telur (ton) Susu (ton) Ikan (ton) Gula (ton)	10.036,40 463,10 6.805,70 24.547,45 2.264,00 235,56 76,67 233,55
8.	Menurunnya persentase penduduk miskin	Angka kemiskinan	4,40%
9.	Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental sert lanjut usia tidak potensial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan penanganan	19%
10.	Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	100%
11.	Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua Bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender.	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	75,59
		2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	78,01
12.	Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	1. Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti	100%
		2. Persentase penurunan kerusuhan bermotif SARA	15%
13.	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	1. Persentase penurunan angka kriminalitas	10%
		2. Persentase penindakan atas Pelanggaran Perda	100%
14.	Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi	1. Luasan kawasan kumuh	444,6
		2. Persentase jalan kota dalam kondisi baik	97%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan	3. Persentase layanan air bersih	90%
		4. Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air	80%
15.	Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya	1. Persentase luasan RTH	15,96%
		2. Persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani	95%
		3. % luasan wilayah yang telah sesuai dengan peruntukannya	58%
16.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK	5
		2. Nilai SAKIP Kota Malang	67
		3. Opini BPK	WTP
17.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat	78,16



MALANG KUÇEÇWARA

NO.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 101.891.914.858,01
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 80.285.027.240,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 22.338.716.050,00
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	Rp. 11.697.110.606,00
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp. 1.767.500.000,00
6	Program Pendidikan Non Formal	Rp. 1.465.000.000,00
7	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 19.315.800.000,00
8	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Rp. 110.546.954.508,00
9	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp. 63.083.135.000,00
10	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp. 546.000.000,00
11	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Rp. 20.684.590.000,00
12	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp. 16.873.500.000,00
13	Program Pelayanan Kesehatan Dasar	Rp. 35.132.443.780,15
14	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Rp. 228.900.000,00
15	Program Pelayanan Kesehatan Tradisional	Rp. 155.400.000,00
16	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp. 2.287.209.000,00
17	Program Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp. 580.665.500,00
18	Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Rp. 1.382.641.100,00
19	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga	Rp. 7.434.590.000,00
20	Program Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Rp. 247.700.000,00
21	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Alat Kesehatan	Rp. 13.071.746.816,00
22	Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	Rp. 23.410.541.000,00
23	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp. 5.743.000.000,00
24	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Rp. 4.765.868.500,00
25	Program Pembangunan dan pemeliharaan turap/talud/brojong	Rp. 4.613.604.000,00
26	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp. 144.495.207.300,00

NO.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN
27	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Rp. 1.367.575.000,00
28	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rp. 4.081.000.000,00
29	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Rp. 14.221.546.000,00
30	Program Pembangunan Sumber Daya Air	Rp. 313.792.000,00
31	Program Pengawasan dan Pengendalian Bangunan	Rp. 920.000.000,00
32	Program Pembangunan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor	Rp. 58.102.741.100,00
33	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	Rp. 21.906.748.000,00
34	Program Perencanaan Ruang	Rp. 658.000.000,00
35	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp. 780.000.000,00
36	Program Pembangunan sistem informasi/data base sumber daya air dan drainase	Rp. 1.027.260.000,00
37	Program Pembangunan sistem informasi/data base jaringan air minum dan air limbah	Rp. 590.500.000,00
38	Program Pembangunan sistem informasi/data base gedung/bangunan	Rp. 1.100.000.000,00
39	Program Pembangunan sistem informasi/data base tata ruang	Rp. 373.600.000,00
40	Program Bina Jasa Konstruksi	Rp. 700.000.000,00
41	Program Penyelenggaraan Pengujian Mutu Bahan dan Alat Berat	Rp. 1.075.000.000,00
42	Program Pengendalian dan Pengawasan Perumahan dan Permukiman	Rp. 8.697.173.000,00
43	Program Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	Rp. 2.570.937.500,00
44	Program Pembangunan Sarana Prasarana Penerangan Jalan	Rp. 2.708.667.502,99
45	Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Penerangan Jalan	Rp. 12.257.640.250,00
46	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp. 13.348.252.000,00
47	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Rp. 1.000.400.000,00
48	Program Penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah	Rp. 144.484.000,00
49	Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 5.254.800.000,00
50	Program Penegakan Perundang-undangan Daerah	Rp. 1.543.130.000,00

NO.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN
51	Program Pembinaan Polisi Pamong Praja	Rp. 852.275.000,00
52	Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas	Rp. 4.770.865.000,00
53	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rp. 3.200.000.000,00
54	Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial	Rp. 10.240.042.500,00
55	Program Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Rp. 768.530.000,00
56	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp. 2.719.112.900,00
57	Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 1.184.085.200,00
58	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 1.900.000.000,00
59	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp. 830.910.000,00
60	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp. 1.380.300.000,00
61	Program Pemberdayaan Perempuan	Rp. 2.854.000.000,00
62	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp. 1.246.180.000,00
63	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp. 727.120.000,00
64	Program Pengembangan Penganekaragaman, Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Rp. 1.008.930.000,00
65	Program Pengembangan Tata Lingkungan Hidup	Rp. 1.455.432.800,00
66	Program Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	Rp. 1.504.407.100,00
67	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp. 30.173.040.760,00
68	Program Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Rp. 773.975.000,00
69	Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Rp. 1.369.100.000,00
70	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp. 422.000.000,00
71	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp. 2.483.136.000,00
72	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp. 2.045.522.750,00
73	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Rp. 590.250.000,00
74	Program Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Rp. 305.470.000,00

NO.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN
75	Program Keluarga Berencana	Rp. 2.484.615.000,00
76	Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Rp. 2.433.946.000,00
77	Program Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lanjut Usia	Rp. 375.000.000,00
78	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Rp. 555.196.800,00
79	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rp. 4.000.000.000,00
80	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp. 796.650.000,00
81	Program Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rp. 1.561.713.000,00
82	Program Pengendalian Penyelenggaraan Perparkiran	Rp. 979.750.000,00
83	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rp. 2.578.510.000,00
84	Program Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik	Rp. 1.492.500.000,00
85	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 7.370.814.900,00
86	Program Peningkatan Penyelenggaraan Komunikasi Publik	Rp. 693.040.000,00
87	Program Pengembangan Koperasi	Rp. 1.508.493.000,00
88	Program Pengawasan Koperasi	Rp. 854.475.000,00
89	Program Pengembangan Usaha Mikro	Rp. 4.737.711.000,00
90	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp. 750.000.000,00
91	Program Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal	Rp. 900.000.000,00
92	Program Pengolahan Data dan Informasi	Rp. 883.183.000,00
93	Program Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan	Rp. 212.950.000,00
94	Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Rp. 729.875.000,00
95	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Rp. 865.205.000,00
96	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Rp. 449.940.000,00
97	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Rp. 1.051.880.000,00
98	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Rp. 2.293.996.000,00
99	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rp. 6.448.000.000,00

NO.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN
100	Program Pengelolaan Data dan Informasi Statistik	Rp. 320.000.000,00
101	Program Pengelolaan Persandian	Rp. 97.600.000,00
102	Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya	Rp. 2.795.447.700,00
103	Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan	Rp. 572.220.000,00
104	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rp. 1.563.356.275,00
105	Program Pengelolaan Arsip Daerah	Rp. 708.441.000,00
106	Program Peningkatan Produksi Perikanan	Rp. 725.000.000,00
107	Program Pengembangan Perbenihan Ikan	Rp. 586.000.000,00
108	Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Rp. 1.452.020.000,00
109	Program Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata	Rp. 2.477.329.300,00
110	Program Peningkatan Produksi Tanaman	Rp. 1.256.430.000,00
111	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Rp. 264.100.000,00
112	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 535.900.000,00
113	Program Peningkatan Penyuluhan Usaha Pertanian	Rp. 318.500.000,00
114	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp. 937.000.000,00
115	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Rp. 225.000.000,00
116	Program Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Pasar	Rp. 15.576.932.000,00
117	Program Pengembangan Usaha Perdagangan	Rp. 2.442.145.000,00
118	Program Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka	Rp. 2.250.860.500,00
119	Program Pengembangan Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman	Rp. 3.949.236.000,00
120	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 4.395.690.997,90
121	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Rp. 2.060.080.000,00
122	Program Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya	Rp. 1.172.450.000,00
123	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Rp. 4.350.655.000,00

NO.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN
124	Program Penyusunan Anggaran Daerah	Rp. 1.998.587.000,00
125	Program Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah	Rp. 1.995.057.000,00
126	Program Pelaporan Keuangan Daerah	Rp. 1.072.278.800,00
127	Program Panatausahaan Aset Daerah	Rp. 2.073.469.500,00
128	Program Pemanfaatan Aset Daerah	Rp. 1.466.408.400,00
129	Program Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	Rp. 3.228.861.800,00
130	Program Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Rp. 1.337.650.000,00
131	Program Pengembangan Potensi Pajak Daerah	Rp. 3.617.465.200,00
132	Program Pengadaan, Penempatan dan Pembinaan Karir Kepegawaian	Rp. 2.113.935.000,00
133	Program Fasilitas Pemberhentian Pegawai	Rp. 133.775.000,00
134	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	Rp. 4.847.034.000,00
135	Program Pembinaan Kepegawaian	Rp. 748.615.000,00
136	Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	Rp. 300.000.000,00
137	Program Penguatan Inovasi, Riset dan Pengembangan	Rp. 2.250.000.000,00
138	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan	Rp. 4.060.000.000,00
139	Program Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokoleran, dan Hubungan Antar Lembaga	Rp. 13.640.000.000,00
140	Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 16.289.500.000,00
141	Program Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian	Rp. 885.000.000,00
142	Program Pengembangan Kebijakan Bidang SDA dan Infrastruktur	Rp. 715.000.000,00
143	Program Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Rp. 2.615.000.000,00
144	Program Penataan dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 1.505.000.000,00
145	Program Penerapan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.445.000.000,00
146	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp. 1.763.565.000,00
147	Program Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp. 1.868.175.000,00

NO.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN
148	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rp. 3.100.000.000,00
149	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah I	Rp. 329.595.600,00
150	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah II	Rp. 428.854.400,00
151	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah III	Rp. 338.076.400,00
152	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah IV	Rp. 988.186.000,00
153	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rp. 10.186.420.300,00
154	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rp. 38.132.684.400,00
155	Program Penyelenggaraan Fungsi Kehumasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rp. 4.444.390.000,00
156	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 794.000.000,00
157	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp. 475.000.000,00
158	Program Pemberdayaan Ormas dan LSM	Rp. 50.000.000,00
159	Program Kewaspadaan Daerah	Rp. 5.404.500.000,00
160	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Rp. 706.800.000,00
161	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Rp. 2.248.150.000,00
162	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Rp. 1.034.585.000,00
163	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	Rp. 12.981.128.500,00
164	Program Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 11.098.641.500,00
165	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	Rp. 21.987.371.000,00
166	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan	Rp. 12.063.412.500,00

Malang, 13 Oktober 2017

WALIKOTA MALANG,

H. MOCH. ANTON